

BAB III. VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Agar memiliki panduan pembangunan jangka panjang yang terarah, dengan bertolak dari kondisi umum daerah yang dihadapi perlu dirumuskan kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kuningan yang meliputi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan. Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang tersebut berlaku untuk kurun waktu 2005 – 2025 (20 tahun) yang harus dijadikan acuan oleh para calon kepala daerah dalam menentukan visi dan misinya serta oleh para kepala daerah selama kurun waktu tersebut dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan setiap lima tahun sekali.

3.1. Visi

Visi Kabupaten Kuningan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

” Dengan Iman dan Taqwa Kuningan sebagai Kabupaten Agropolitan dan Wisata Termaju di Jawa Barat Tahun 2025 ”

Visi ini menegaskan cita-cita yang hendak diwujudkan selama 20 tahun ke depan oleh Kabupaten Kuningan adalah menjadi Kabupaten pertanian dan wisata yang *paling maju* diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. **Kabupaten Agropolitan dan wisata** serta **Termaju di Jawa Barat** merupakan kalimat dan kata kunci yang menjadi substansi dari Visi Jangka Panjang ini.

Kabupaten Agropolitan dan Wisata dalam konteks Visi ini mengandung pengertian Kabupaten yang produksi daerahnya didominasi oleh *dua besar sektor* yaitu secara berturut-turut *sektor pertanian* dan *jasa pariwisata*. Dalam sektor pertanian, dinamika kegiatan berlangsung pada seluruh sub-sistemnya dengan fokus pada sub-sistem pengolahan (*agroindustri*) yang secara keseluruhan mewujudkan *kawasan agropolitan* yang padu. Jatidiri kabupaten pertanian dan wisata ini paling tidak ditunjukkan oleh 3 (tiga) ciri utama, yaitu *ciri struktural sosial ekonomi*, *ciri tata ruang*, dan *ciri fisik infrastruktur*.

Ciri struktural sosial ekonomi kabupaten agropolitan dan wisata adalah memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang pangsa (*share*) terbesarnya secara berurutan berasal dari sektor pertanian dalam arti luas (pertanian lahan basah, perkebunan, kehutanan, peternakan) dan sektor jasa pariwisata. Pada sektor pertanian peran terbesar diberikan oleh sub-

sektor industri pengolahan, sedangkan pada sektor pariwisata peran terbesar diberikan oleh jasa pariwisata alam; memiliki kesempatan kerja dengan pangsa terbesar pada sektor pertanian dan jasa pariwisata; memiliki produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian yang relatif tinggi sebagai implikasi dari tingginya tingkat penerapan teknologi; sektor pertanian didominasi oleh *unit-unit kegiatan basis*, yaitu unit kegiatan usaha yang sebagian besar produknya dipasarkan ke luar daerah (*ekspor regional*); serta memiliki tatanan kelembagaan baik berupa institusi maupun regulasi yang kuat dan *capable* dalam menjamin kesinambungan pembangunan pertanian dan pariwisata.

Ciri Tata Ruang dari Kabupaten Agropolitan dan Wisata adalah memiliki perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menyeluruh, sinergis, dan terpadu yang menjamin terwujudnya kawasan agropolitan dan kawasan wisata yang serasi dan saling mendukung; menjamin terbentuknya gugus-gugus (*cluster*) kegiatan pertanian yang padu berdasarkan pola keterkaitan dan kesesuaian dalam pewilayahan yang terarah; serta menjamin keberlanjutan pembangunan pertanian dan pariwisata.

Ciri fisik infrastruktur Kabupaten Pertanian dan Pariwisata adalah memiliki prasarana dan sarana penunjang aktivitas pertanian dan pariwisata yang lengkap dan bisa diandalkan yang meliputi prasarana dasar berupa jalan dan jembatan yang berkualitas, sarana pendukung langsung kegiatan pertanian, dan sarana pendukung langsung kegiatan pariwisata dalam situasi dan kondisi yang menjamin keberlanjutannya.

Termaju di Jawa Barat mengandung pengertian sampai dengan tahun 2027 Kabupaten Kuningan akan berupaya keras untuk memacu keunggulan-keunggulan pada seluruh atau sebagian besar ciri kabupaten pertanian dan pariwisata tersebut di atas sehingga secara keseluruhan bisa menjadi yang terunggul dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat.

Rumusan Visi tersebut bertolak dari pola pikir pengutamaan potensi dominan atau keunggulan komparatif Daerah tanpa mengabaikan pengembangan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berdasarkan pola pikir tersebut, Kabupaten Kuningan perlu berkonsentrasi pada bidang tertentu yang paling potensial sebagai sektor pemimpin (*leading sector*) dalam proses pembangunan secara keseluruhan.

Pola pikir ini juga berpijak pada satu kesadaran bahwa tidak setiap bidang memiliki potensi dan kekuatan yang sama untuk berkembang. Sebagian bidang memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menjadi penggerak pembangunan secara keseluruhan, sementara sebagian lain tidak. Oleh

karena sumberdaya terbatas maka penekanan perlu diberikan pada bidang yang memiliki potensi dominan tersebut sebagai penggerak utama pembangunan secara keseluruhan. Bidang pembangunan yang memiliki potensi dominan di Kabupaten Kuningan adalah Pertanian (agropolitan) dan Pariwisata, khususnya pariwisata alam.

Visi tersebut menyiratkan makna bahwa untuk menjadi maju dalam konteks percaturan pembangunan dengan wilayah lainnya Kabupaten Kuningan harus berfokus pada kedua bidang tersebut yang menjadi keunggulannya. Hal ini dengan tidak mengabaikan pelaksanaan pembangunan secara memadai pada bidang-bidang lainnya, karena pada hakikatnya pembangunan daerah adalah membangun masyarakat secara menyeluruh. Fokus terhadap bidang pertanian dan pariwisata bukan perwujudan semangat sektoral yang sempit, namun semata-mata merupakan upaya menempatkan kedua bidang unggulan tersebut sebagai **penggerak utama** pembangunan menyeluruh di Kabupaten Kuningan.

Untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Panjang tersebut perlu ditempuh langkah-langkah besar yang terarah, kongkrit, dan memiliki ukuran-ukuran yang jelas. Langkah tersebut dituangkan dalam wujud Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kuningan tahun 2005-2025.

3.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh 6 Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kuningan sebagai berikut.

1. **Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia.** Misi ini adalah membangun integritas dan kapasitas sumberdaya manusia Kabupaten Kuningan dengan meningkatkan akhlak dan budi pekerti yang dilandasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; meningkatkan keterampilan untuk menopang penghidupan; dan membangun sikap menghargai lingkungan. Dengan memiliki kualitas yang tinggi dalam seluruh aspek tersebut diharapkan sumberdaya manusia Kabupaten Kuningan bisa bersaing dengan sumberdaya manusia dari wilayah lain yang telah maju.
2. **Mewujudkan agribisnis yang tangguh dalam kerangka agropolitan.** Misi ini adalah membangun sistem agribisnis yang maju dalam kerangka kawasan pertanian terpadu (agropolitan) dengan meningkatkan sinergitas antara prasarana dasar (suprastruktur dan infrastruktur), sub-sistem sarana pertanian, sub-sistem budidaya

pertanian, sub-sistem pengolahan hasil, dan sub-sistem penjualan; meningkatkan produktivitas budidaya dan industri agro; dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

3. **Mewujudkan pariwisata alam yang maju.** Misi ini adalah mengoptimalkan pengelolaan pariwisata alam daerah untuk menjadi yang terdepan di wilayah Ciayumajakuning/Jawa Barat dengan mengoptimalkan pendayagunaan pariwisata daerah; meningkatkan daya saing pariwisata daerah; dan menempatkannya sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Barat/Indonesia.
4. **Mewujudkan pemerataan pembangunan Daerah.** Misi ini adalah mewujudkan keseimbangan pelaksanaan pembangunan diantara bagian-bagian wilayah Kabupaten Kuningan berdasarkan permasalahan dan potensi masing-masing melalui distribusi alokasi anggaran dan kegiatan pembangunan yang adil; pengembangan infrastruktur perhubungan di daerah terpencil dan perbatasan; peningkatan daya dukung dan daya tampung daerah perkotaan; peningkatan daya beli; dan peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat.
5. **Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dengan berorientasi pada jasa lingkungan.** Misi ini adalah mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berfokus pada pemanfaatan jasa lingkungan melalui pelestarian kawasan lindung dan kawasan budidaya guna mencapai Kabupaten Konservasi; peningkatan konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, hutan, lahan, dan tambang; peningkatan penerimaan daerah dari jasa lingkungan; dan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana alam.
6. **Mewujudkan masyarakat yang agamis, mandiri, dan dinamis.** Misi ini adalah membangun masyarakat yang memiliki iman dan taqwa prakarsa, serta kemandirian yang tinggi dalam memenuhi penghidupannya serta memiliki sikap positif dan dorongan partisipasi yang tinggi dalam Pembangunan Daerah. Masyarakat tersebut memiliki sifat umum demokratis, saling pengertian, rukun, tenggang rasa, taat hukum, dinamis-konstruktif, serta memiliki perilaku sosial yang agamis.

3.3. Arah Pembangunan Daerah 2005 - 2025

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut ditentukan sasaran pokok Pembangunan Daerah tahun 2005 – 2025 beserta kriteria pencapaiannya sebagai berikut.

A. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia sehingga memiliki daya saing yang tinggi yang ditunjukkan oleh:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan dicirikan oleh menurunnya jumlah balita gizi buruk, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kesakitan Kasar (AKK), penyakit berbasis lingkungan, meningkatnya Usia Harapan Hidup serta terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan masyarakat dan produktivitas dengan dicirikan oleh meningkatnya Angka Melek Huruf mencapai 100, meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 12 tahun, dan meningkatnya penguasaan IPTEK berbasis IMTAQ.
3. Terbangunnya budi pekerti dan perilaku yang luhur, jujur, amanah, dan bertanggung jawab di kalangan masyarakat dan aparatur yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang kuat untuk mendorong terciptanya kontrol sosial yang efektif serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
4. Berkembangnya lembaga pendidikan formal dan non formal serta lembaga peningkatan keterampilan masyarakat dalam berbagai bidang.
5. Meningkatnya integritas, kapasitas, dan profesionalisme aparatur dan seluruh unsur Pemerintahan Daerah yang berimplikasi pada efisiennya birokrasi dan pelayanan publik.

B. Terwujudnya agribisnis yang maju dalam kerangka agropolitan yang ditunjukkan oleh:

1. Terbangunnya infrastruktur dan suprastruktur pendukung pembangunan pertanian secara lengkap dan memadai yang menjadi prasyarat bagi agropolitan.
2. Terjalinnnya keterkaitan dan sinergitas antar sektor hulu, tengah, hilir, dan sektor penunjang pertanian dalam suatu sistem agribisnis yang padu dengan distribusi margin yang proporsional dan memenuhi rasa keadilan.
3. Meningkatnya produktivitas dan produksi sub sektor budidaya pertanian sehingga memberikan dorongan yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB).

4. Meningkatnya produktivitas dan produksi sub sektor pengolahan hasil pertanian (*agroindustri*) yang ditulangpungungi oleh perekonomian rakyat sehingga menjadi **penyumbang terbesar** dari sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
5. Dominannya industri pengolahan hasil *yang bersifat basis* (menjual produknya ke luar wilayah Kuningan) dalam komunitas agroindustri daerah.
6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dengan dorongan utama dari perkembangan pesat agroindustri sehingga meningkatkan pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat.

C. **Terwujudnya pariwisata alam yang maju** yang ditunjukkan oleh:

1. Terbangunnya pengelolaan pariwisata alam daerah yang handal dan modern dengan didukung oleh sarana-prasarana yang memadai, sistem pengelolaan yang efisien dan pelaksana yang profesional.
2. Terdayagunakannya seluruh potensi pariwisata alam daerah yang unggul dalam sistem pengelolaan yang efisien dan profesional.
3. Terwujudnya Kabupaten Kuningan sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia.
4. Tercapainya sub sektor jasa pariwisata sebagai penyumbang terbesar ke dua terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
5. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian rakyat yang diakibatkan oleh dampak pengganda perkembangan pariwisata daerah.

D. **Terwujudnya pemerataan pembangunan daerah** yang ditunjukkan oleh:

1. Optimalnya sistem dan mekanisme yang menjamin alokasi anggaran dan pembangunan yang merata berdasarkan permasalahan dan potensi wilayah.
2. Terlaksananya pembangunan secara berkeadilan yang memberikan dorongan kepada semua wilayah untuk memperoleh kapasitas awal yang sama untuk berkembang.
3. Terbangunnya infrastruktur dasar yang memadai di wilayah terpencil dan wilayah perbatasan.
4. Terbangunnya infrastruktur perkotaan yang memadai untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan.
5. Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang dicirikan oleh menurunnya rasio gini (*gini ratio*).

E. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dengan berorientasi pada jasa lingkungan yang ditunjukkan oleh:

1. Mantapnya kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dicirikan oleh efektifnya pengaturan (*regulasi*) serta organisasi pengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Daerah.
2. Terbangunnya sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan terpadu yang dicirikan oleh adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang utuh dan sinergis antar jenis pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
3. Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dari sumberdaya alam dan lingkungan disertai menurunnya pemanfaatan yang bersifat ekstraktif terhadap hasil-hasil langsung sumberdaya alam.
4. Terjaga dan terpeliharanya kawasan lindung secara optimal.
5. Terlaksananya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di kawasan budidaya secara optimal.
6. Menurunnya luas lahan kritis hingga mencapai nol persen.

F. Terwujudnya masyarakat yang agamis, dinamis, dan mandiri yang ditunjukkan oleh:

1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.
2. Terciptanya kemandirian masyarakat dalam membangun kehidupannya yang dicirikan oleh tingginya prakarsa dan swakarsa masyarakat serta rendahnya ketergantungan terhadap Pemerintah.
3. Meningkatnya kesadaran dan pentaatan hukum masyarakat dan pelaksana pemerintahan yang dicirikan oleh menurunnya tindakan kriminal dan pelanggaran hukum serta perundangan.
4. Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar kelompok masyarakat serta meningkatnya kesadaran politik masyarakat.
5. Terwujudnya masyarakat pembelajar yang kreatif dan memiliki dorongan untuk maju yang tinggi dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Kuningan 2025, ditentukan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Kuningan untuk 20 tahun ke depan sebagai berikut.

3.3.1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia.

1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak diarahkan pada pengembangan pelayanan kesehatan ibu khususnya dalam persalinan melalui peningkatan pelayanan oleh tenaga medis; serta peningkatan gizi ibu dan anak.
2. Peningkatan Kesehatan Lingkungan diarahkan pada pengembangan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; peningkatan kualitas sarana prasarana lingkungan; dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kesehatan lingkungan yang optimal.
3. Peningkatan sumberdaya kesehatan diarahkan pada peningkatan mutu dan kuantitas sarana prasarana kesehatan; peningkatan kualitas sumberdaya manusia kesehatan; dan penguatan jejaring pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat diarahkan pada pendekatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
5. Pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) diarahkan pada peningkatan peran serta seluruh unsur masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan diarahkan pada peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penuntasan wajardikdas 9 tahun yang bermutu (tamat SMP atau Madrasah Tsanawiyah dan Kejar Paket B), dan percepatan pencapaian pendidikan 12 tahun melalui pengembangan mekanisme *insentif* yang bisa membangun kesadaran dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mengikutsertakan anak-anak mereka dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi khususnya ke tingkat SLTA (SMU, Sekolah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Paket C) serta Perguruan tinggi. Mekanisme insentif yang akan dikembangkan terutama berupa alokasi beasiswa secara kompetitif bagi anak didik potensial dengan pengutamaan dari keluarga kurang mampu; serta peningkatan peran keluarga dan lembaga lokal-tradisional dalam membangun kesadaran berpendidikan masyarakat.
7. Pemberantasan buta aksara diarahkan pada penuntasan penduduk yang masih belum melek huruf; menjamin tidak adanya penduduk buta aksara baru sehingga pada tahun 2025 Kabupaten Kuningan bebas dari buta aksara (Angka Melek Huruf mencapai 100%); dan peningkatan peran lembaga lokal-tradisional dalam pemberantasan buta aksara.
8. Peningkatan prasarana, sarana, dan tenaga pendidikan diarahkan pada penuntasan rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak dan penjaminan pemeliharannya; pembangunan unit-unit sekolah baru di daerah yang kurang terjangkau; peningkatan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar, perpustakaan, dan laboratorium; pemenuhan dan

pemerataan kebutuhan guru; peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru; penerapan teknologi jaringan informasi; pengembangan kurikulum bermuatan lokal dan berbasis kecakapan hidup; pengembangan sistem penghargaan bagi guru; serta pendukung peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah.

9. Peningkatan budi pekerti dan perilaku yang luhur diarahkan pada internalisasi moralitas dan etika bersumber dari nilai agama dan kearifan lokal melalui unjuk keteladanan, sosialisasi, dan penyadaran publik guna mewujudkan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia berdasarkan iman dan taqwa.
10. Pengembangan pendidikan luar sekolah diarahkan pada peningkatan insentif bagi tumbuh kembangnya lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan dan lembaga peningkatan keterampilan yang memiliki keterkaitan erat dengan pasar kerja; Peningkatan pendidikan dan latihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dengan fokus utama kelompok usia paling produktif; pengembangan kemitraan dengan dunia usaha lokal, regional, dan nasional; dan peningkatan kelengkapan prasarana dan sarana pendidikan angkatan kerja.
11. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dititikberatkan pada penguasaan teknologi terapan tepat guna melalui peningkatan persentuhan (*exposure*) masyarakat dengan teknologi baik langsung maupun tidak langsung; Peningkatan peran serta lembaga pendidikan tinggi daerah dalam kajiterap IPTEK serta peningkatan kemudahan dan insentif bagi berlangsungnya pelatihan penerapan teknologi untuk masyarakat.
12. Peningkatan kualitas kependudukan diarahkan pada peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Keluarga Berencana; peningkatan penanganan penduduk pra produktif melalui investasi sosial pendidikan dan pengembangan keterampilan; serta peningkatan penanganan terhadap penduduk pasca produktif (lanjut usia).
13. Peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur diarahkan pada internalisasi nilai agama, budaya dan etika ke dalam sikap dan perilaku aparatur melalui pembinaan spiritual, penegakan disiplin dan mekanisme penghargaan; peningkatan kemampuan aparatur melalui pendidikan dan latihan; peningkatan sarana kerja aparatur dengan fokus pada sarana berbasis teknologi informasi. Keseluruhan arah tersebut ditempuh guna mencapai birokrasi yang efisien dan berorientasi secara optimal pada pelayanan publik.

3.3.2. Mewujudkan agribisnis yang tangguh dalam kerangka agropolitan.

1. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pembangunan pertanian diarahkan pada pembangunan prasarana perhubungan dan penunjang yang menopang interaksi daerah penunjang (*hinterland*) dengan pusat distrik agropolitan; peningkatan prasarana irigasi; dan peningkatan sarana penunjang agribisnis pada pusat primer dan sekunder;
2. Pengembangan integrasi sistem agribisnis diarahkan pada peningkatan keterkaitan dan kesesuaian (*link and match*) antar sub sistem agribisnis dengan fokus pada sub sistem budidaya, sub sistem pengolahan, sub sistem penjualan, dan tata niaga melalui pengembangan kemitraan dalam bentuk perhimpunan fungsional dan kerjasama usaha.
3. Perwujudan keadilan ekonomi antar sub sistem agribisnis diarahkan pada pengembangan sistem tata niaga yang menjamin berlangsungnya pembagian margin yang adil antar sub sistem agribisnis, dan menjamin diperolehnya kepuasan masyarakat secara optimal.
4. Peningkatan produksi dan produktivitas diarahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja *sub sektor budidaya* dan *sub sektor pengolahan hasil* melalui peningkatan kemampuan petani dan pengolah, peningkatan aksesibilitas petani dan pengolah terhadap lembaga modal formal, peningkatan kemitraan petani dan pengolah dengan industri hilir, pengembangan pasar dengan fokus wilayah regional dan nasional, dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna yang produktif.
5. Peningkatan penataan ruang dalam kerangka pengembangan agribisnis diarahkan pada pemantapan *perencanaan rinci* pemanfaatan ruang kegiatan pada setiap distrik agropolitan; pentaatan rencana tata ruang; dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Peningkatan kerangka regulasi diarahkan pada pengembangan pengaturan yang memberikan insentif bagi setiap pelaku agribisnis untuk membangun sinergitas satu sama lain dan melakukan kompetisi yang bersih dalam menjalankan usaha.

3.3.3. Mewujudkan pariwisata yang maju.

1. Peningkatan prasarana dan sarana pariwisata diarahkan pada pembangunan dan peningkatan prasarana penunjang secara optimal di kawasan wisata; dan peningkatan sarana wisata secara optimal di Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW).
2. Peningkatan Pendayagunaan diarahkan pada pemantapan perencanaan pengembangan pariwisata daerah secara komprehensif; peningkatan promosi pariwisata daerah ke lingkup regional, nasional, dan internasional; pendayagunaan potensi pariwisata alam, budaya, dan

sejarah; pembangunan sistem dan pengelola pariwisata daerah yang profesional melalui peningkatan kemitraan dengan lembaga pengembang pariwisata.

3. Peningkatan sumbangan terhadap PDRB diarahkan pada peningkatan produksi jasa pariwisata dan jasa pendukungnya (hotel, restoran, dan cinderamata) melalui peningkatan kunjungan wisata sehingga mampu menjadi penyumbang terbesar kedua setelah sektor pertanian terhadap PDRB.
4. Pengembangan perekonomian rakyat berbasis wisata diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas usaha rakyat yang mendukung berkembangnya industri pariwisata di Kabupaten Kuningan.

3.3.4. Mewujudkan pemerataan pembangunan Daerah.

1. Peningkatan infrastruktur dalam rangka pemerataan diarahkan pada pembangunan prasarana dasar khususnya jalan dan jembatan di wilayah terpencil dan perbatasan dengan kualitas dan syarat keamanan, keselamatan, dan kenyamanan yang memadai; Peningkatan sarana penunjang fungsi jalan; Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang meliputi prasarana drainase, air bersih, dan perumahan.
2. Pemerataan alokasi pembangunan diarahkan pada distribusi kegiatan pembangunan yang proporsional antar wilayah berdasarkan bobot permasalahan dan potensi masing-masing wilayah.
3. Pemerataan kesempatan kerja dan pendapatan diarahkan pada pemberian ruang kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja; Optimasi pendayagunaan fiskal daerah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dengan fokus di wilayah dengan jumlah pengangguran relatif tinggi; Meningkatkan insentif pengembangan lapangan kerja oleh dunia usaha di Daerah.
4. Pengentasan kemiskinan diarahkan pada peningkatan jaminan sosial terhadap kelompok masyarakat miskin yang terkendala; serta peningkatan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat miskin yang berada dalam usia produktif.

3.3.5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari berbasis pada jasa lingkungan.

1. Pemantapan kawasan berfungsi lindung diarahkan pada pemantapan kelembagaan pengelolaan kawasan berfungsi lindung; peningkatan dukungan terhadap Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai; pengelolaan Kebun Raya Kuningan secara profesional; peningkatan konservasi lahan; dan peningkatan kerjasama dengan lembaga yang

berkompeten dan profesional dalam pengelolaan kawasan berfungsi lindung.

2. Optimasi pendayagunaan jasa lingkungan diarahkan pada peningkatan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan dengan pihak pengguna berdasarkan mekanisme *reward* yang adil dan kelembagaan yang stabil.
3. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan diarahkan pada penuntasan rehabilitasi pada sisa lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan dan meningkatkan jaminan tidak adanya lahan kritis baru; dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan.
4. Peningkatan konservasi di kawasan budidaya diarahkan pada peningkatan penerapan langkah-langkah konservasi oleh masyarakat di kawasan budidaya; peningkatan pengaturan dan penegakan ketentuan konservasi di kawasan budidaya; peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya dalam bentuk hutan kota; dan internalisasi etika konservasi kepada masyarakat.

3.3.6. Terwujudnya masyarakat yang agamis, dinamis, dan mandiri.

1. Peningkatan kehidupan agama diarahkan pada peningkatan penghayatan dan pengamalan agama *berdasarkan iman dan taqwa* oleh pemeluknya melalui pengembangan kegiatan lembaga keagamaan baik yang bersifat formal maupun tradisional; dan peningkatan kelembagaan komunikasi antar unsur dan kelompok masyarakat.
2. Peningkatan kemandirian diarahkan pada minimalisasi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan langsung pemerintah dalam membangun kehidupannya; Meningkatkan prakarsa, daya kreatif, inovasi dan swakarsa masyarakat dalam membangun kehidupannya.
3. Peningkatan kreatifitas dan produktivitas pemuda diarahkan pada peningkatan ruang kesempatan bagi pemuda untuk mengembangkan potensi diri semaksimal mungkin.
4. Peningkatan kesadaran hukum dan politik diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum dalam berbagai aspek kehidupan mereka sehingga berlangsung pentaatan hukum; peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik; dan Peningkatan demokratisasi dalam kehidupan politik dan penyelenggaraan pemerintahan.
5. Peningkatan kerukunan antar unsur dan kelompok masyarakat diarahkan pada pengembangan toleransi dan kesalingpahaman antar unsur dan kelompok masyarakat; dan Peningkatan solidaritas antar unsur dan kelompok masyarakat.

3.4. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang

Untuk memberikan arahan pelaksanaan yang lebih jelas perlu ditentukan tahapan pelaksanaan RPJP Kabupaten Kuningan 2005-2025. Oleh karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran yang paling strategis dari RPJPD, maka tahapan pelaksanaan RPJPD tersebut dituangkan dalam bentuk fokus pembangunan lima tahunan dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2025. Tahapan atau fokus pembangunan pada setiap periode harus menjadi panduan pokok kepala daerah pada periode bersangkutan dalam menyusun RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Adanya fokus pada setiap tahapan tidak berarti diabaikannya pembangunan di bidang lainnya. Hal itu semata-mata menunjukkan penekanan atau prioritas utama pembangunan pada setiap tahapan. Tahapan dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1. Periode 2005 - 2009 : Pemantapan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Sumberdaya manusia.** Pada tahapan ini sasaran pokok pelaksanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan infrastruktur wilayah yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Kuningan yang berkualitas tinggi khususnya yang ditunjukkan oleh indikator tingkat pendidikan dan keterampilan, derajat kesehatan, dan moralitas masyarakat serta aparatur pemerintahan daerah. Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur dasar jalan, jembatan, dan drainase, serta infrastruktur yang mendukung langsung pengembangan agropolitan dan pariwisata daerah.
- 2. Periode 2010 – 2014 : Pemantapan Produktivitas dan Pemerataan Pembangunan Daerah.** Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan produktivitas ekonomi masyarakat yang tinggi khususnya produktivitas tenaga kerja di bidang pertanian dan jasa pariwisata yang melebihi rata-rata Jawa Barat; mewujudkan pemerataan yang optimal dalam distribusi pelaksanaan dan pencapaian hasil pembangunan antar wilayah kecamatan dan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat; dan mewujudkan pembangunan wilayah yang seimbang sesuai dengan fungsi masing-masing wilayah. Peningkatan produktivitas yang pesat merupakan pendorong utama bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan sangat berpengaruh terhadap akselerasi pembangunan Kabupaten Kuningan pada tahap selanjutnya. Sedangkan pemerataan pembangunan merupakan tangga utama untuk mencapai masyarakat yang makmur dalam keadilan.

3. Periode 2015 – 2019 : Pemantapan Kemandirian Masyarakat.

Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang memiliki kemandirian tinggi dalam membangun kehidupannya. Kemandirian tersebut sebagai implikasi dari berkembang pesatnya bidang pertanian dan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Wujud kemandirian tersebut yang utama adalah rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan daerah, tingginya daya beli, tingginya sikap positif dan tingkat partisipasi swakarsa masyarakat dalam pembangunan. Kemandirian masyarakat merupakan kunci bagi terwujudnya pembangunan yang digerakan oleh masyarakat, yaitu suatu situasi dimana masyarakat menjadi subjek pembangunan dalam arti yang sesungguhnya.

4. Periode 2020 – 2024 : Pemantapan Peran Daerah dalam Pembangunan Regional dan Nasional.

Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan peran daerah yang menonjol dalam pembangunan di Jawa Barat dan lingkup Nasional. Khusus dalam konteks regional Jawa Barat, hal yang akan diwujudkan adalah mendayagunakan seluruh sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang telah terbangun, khususnya di bidang pertanian dan pariwisata, sehingga menjadi Kabupaten agropolitan dan pariwisata yang paling diperhitungkan. Segenap pencapaian yang diraih pada tahapan sebelumnya menjadi pijakan yang didayagunakan semaksimal mungkin untuk menjadi Kabupaten Agropolitan dan Pariwisata termaju di Jawa barat tanpa menanggalkan keimanan dan ketaqwaan.

BAB IV. KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan yang terarah dari RPJP 2005-2025 ini secara langsung menentukan keberhasilan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, perlu didasarkan pada kaidah-kaidah pelaksanaan yang tepat. Kaidah pelaksanaan dimaksud adalah sebagai berikut.

- (1). **Integratif.** Arah pembangunan di semua bidang ditempuh sebagai kesatuan upaya dalam rangka menjalankan Misi untuk mencapai Visi Kabupaten Kuningan 2025. Kaidah ini mengarahkan pelaksanaan pembangunan pada pola yang terpadu.
- (2). **Koordinatif.** Setiap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kuningan perlu berkomunikasi satu sama lain dalam rangka sinkronisasi peran dan kegiatan guna mencapai kelancaran dan efektifitas pembangunan pada seluruh bidang.
- (3). **Sinergis.** Seluruh arah pembangunan ditempuh dalam kerangka saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain guna mencapai Visi Kabupaten Kuningan 2025.
- (4). **Partisipatif.** Pelaksanaan pembangunan ditempuh berdasarkan peran serta seluruh unsur masyarakat dalam seluruh tahapan prosesnya. Sebagaimana berlangsung dalam proses penyusunan RPJPD, peran serta masyarakat luas juga menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena penyelenggaraan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan baru bisa berjalan jika dilaksanakan oleh seluruh unsur masyarakat sesuai dengan peran dan kapasitasnya.
- (5). **Adaptif.** Pembangunan di masa mendatang akan semakin diwarnai oleh lingkungan eksternal dan internal yang berubah cepat, kompleks, sarat konflik, dan penuh ketidakpastian. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan jangka panjang harus bersifat adaptif, yakni memperhatikan dan tanggap perkembangan lingkungan pembangunan.
- (6). **Berkesinambungan.** Pelaksanaan pembangunan jangka panjang ditempuh dengan menjamin kesinambungannya. Untuk itu keterkaitan dalam suatu urutan tahapan antar periode pembangunan harus selalu diutamakan dalam penjabaran RPJP ini. Rencana dan implementasi pembangunan jangka pendek dan menengah pada periode sebelumnya harus memberikan prakondisi dan menjadi pijakan bagi pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka menengah pada periode selanjutnya.

- (7). **Terkendali.** Pengendalian baik pada tahap proses maupun akhir dilakukan secara ketat untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan baik melalui mekanisme formal maupun melalui *kontrol sosial* yang dilakukan.

BAB V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kuningan 2005 – 2025 yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan dalam menyelenggarakan pembangunan selama 20 tahun ke depan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. RPJPD ini merupakan acuan bagi para calon Bupati Kuningan dalam merumuskan Visi dan Misi yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat.

Sebagai manifestasi dari kedudukannya sebagai pedoman, RPJP Kabupaten Kuningan 2005 – 2025 selanjutnya harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kuningan (RKPD) dalam periode jangka panjang tersebut.

Pencapaian Visi Kabupaten Kuningan 2005 – 2025 melalui pelaksanaan Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang bisa tercapai jika seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kuningan memiliki komitmen bersama, keajegan atau sikap istiqomah dalam menjalankan komitmen tersebut, dan melaksanakan program secara berkesinambungan.